BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Pro•Tha Farma adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga siap dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu untuk bekerja secara professional.
2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan – kegiatan apotek, perundang - undangan farmasi, juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengaturan untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep.
4. Mahasiswa calon Apoteker diharapkan mempunyai kemampuan kerja sama yang baik dengan semua karyawan di apotek maupun setiap orang yang terlibat dalam operasional apotek.
5. Mahasiswa calon apoteker hendaknya dapat berinteraksi dan aktif dalam memberikan konseling, informasi dan edukasi ke pasien, terlebih dalam penyerahan obat dengan penggunaan khusus serta medikasi pada penyakit kronis.

DAFTAR PUSTAKA

- Lacy, F. C., Lora, L. A., Morton, P. G., dan Leonard, L. L., 2008, Lexi-Comp's Drug Reference Handbooks : *Drug Information Handbook*, 17th ed., New York: American Pharmacist Assosiation
- McEvoy, G. K., et al., 2011, *AHFS : Drug Information Essentials*, Maryland: American Society of Health-System Pharmacists
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1983, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6355/Dirjen/SK/69 tentang Tanda Khusus Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1990, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/MenKes/Per/X/1993 tentang Krteria Obat yang dapat Diserahkan Tanpa Resep.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 889 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 35 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
- Presiden Republik Indonesia, 1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Psikotropika.
- Presiden Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tentang Kesehatan.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Seto, S., dan Nita, Y., 2012, Manajemen Farmasi : Dasar – Dasar Akuntansi untuk Apotek dan Industri Farmasi, Surabaya : Pusat Percetakan dan Penerbitan Universitas Airlangga.
- Sweetman, S.C. (ed), 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference*, 36th edition, London : Pharmaceutical Press